

MUTILATION IN ROMANTIC RELATIONSHIPS: THE REPRESENTATION OF GENDER-BASED VIOLENCE IN THE TIARA ANGELINA CASE**MUTILASI DALAM HUBUNGAN CINTA: REPRESENTASI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM KASUS TIARA ANGELINA****Ika Wahidah**

Program Magister Kajian Wanita, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*ika.wahidah25@student.ub.ac.id

Corresponding Author*ABSTRACT**

The case of Tiara Angelina's mutilation by her partner is an extreme representation of the phenomenon of Gender-Based Violence (KBG) in intimate relationships (*Intimate Partner Violence*). This tragedy is not just a criminal incident, but a brutal manifestation of the structural power imbalance and toxic relationship dynamics. This study aims to analyze how KBG, dehumanization, and structural social implications are reflected in these cases. This study uses a Qualitative Approach with an Instrumental Single Case Study design. Data is collected through Media and Document Content Analysis (news, chronological reports, and expert analysis). The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, with a focus on associating empirical findings with the theories of GBP, power, and dehumanization. The main finding of this study is the Structural Roots of KBG where this violence is rooted in the sense of absolute ownership (*sense of entitlement*) of perpetrators operating in toxic relationships. Murder is triggered by the perpetrator's failure to maintain control and dominance, which is a product of patriarchal structures. Mutilation as the Peak of Dehumanization is the act of mutilating the victim's body (into hundreds of parts) beyond the motive of disappearance of evidence, serving as a symbolic action and a physical form of total dehumanization. This shows that the perpetrator has lost the moral and humanitarian value of the victim (*Anomi*), making it a statement of absolute power over the female subject. From the social implications, this case reveals a tendency to blame victims (*victim blaming*) in the public space that obscures the roots of KBG. Structurally, this case shows the urgency of legal protection and more serious early intervention against Dating Violence (KDP) as a public crisis. The mutilation in the case of Tiara Angelina is a reflection of the systematic failure to protect women from extreme birth control. This demands more serious policy interventions, gender-sensitive law enforcement, and increased emotional literacy to prevent love relationships from turning into deadly arenas.

Keywords: Gender-Based Violence (KBG), Mutilation, Toxic Relationship, Dehumanization**ABSTRAK**

Kasus mutilasi Tiara Angelina oleh pasangannya menjadi representasi ekstrem dari fenomena Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam relasi intim (*Intimate Partner Violence*). Tragedi ini bukan hanya insiden kriminal, tetapi manifestasi brutal dari ketidakseimbangan kuasa struktural dan dinamika *toxic relationship*. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana KBG, dehumanisasi, dan implikasi sosial struktural terefleksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan desain Studi Kasus Tunggal Instrumental. Data dikumpulkan melalui Analisis Isi Media dan Dokumen (berita, laporan kronologi, dan analisis ahli). Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, dengan fokus pada pengaitan temuan empiris dengan teori KBG, kekuasaan, dan dehumanisasi. Temuan Utama dari studi ini adalah akar struktural KBG dimana kekerasan ini berakar pada rasa kepemilikan mutlak (*sense of entitlement*) pelaku yang beroperasi dalam relasi yang beracun (*toxic relationship*). Pembunuhan dipicu oleh kegagalan pelaku untuk mempertahankan kontrol dan dominasi, yang merupakan produk dari struktur patriarki. Mutilasi sebagai Puncak Dehumanisasi merupakan tindakan mutilasi jasad korban (menjadi ratusan bagian) melampaui motif penghilangan bukti, berfungsi sebagai aksi simbolik dan wujud fisik dari dehumanisasi total. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah kehilangan nilai moral dan kemanusiaan korban (*Anomi*), menjadikannya pernyataan kekuasaan absolut terhadap subjek perempuan. Dari implikasi sosial kasus ini mengungkap adanya

kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) di ruang publik yang mengaburkan akar KBG. Secara struktural, kasus ini menunjukkan urgensi perlindungan hukum dan intervensi dini yang lebih serius terhadap Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebagai krisis publik. Mutilasi dalam kasus Tiara Angelina adalah cerminan kegagalan sistematis untuk melindungi perempuan dari KBG ekstrem. Hal ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih serius, penegakan hukum yang berperspektif gender, dan peningkatan literasi emosional untuk mencegah relasi cinta berubah menjadi arena kekerasan yang mematikan.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Mutilasi, *Toxic Relationship*, Dehumanisasi

1. PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender (KBG) masih menjadi salah satu isu sosial yang mendesak di Indonesia. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa setiap tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi cenderung meningkat (Perempuan, 2023). Fenomena ini menggambarkan bahwa perempuan masih rentan terhadap relasi kuasa yang timpang, baik di ruang publik maupun privat (Harjoni, 2013).

Kasus mutilasi terhadap Tiara Angelina Saraswati di Surabaya pada Agustus tahun 2025 menjadi salah satu potret ekstrim dari kekerasan tersebut. Korban perempuan, berusia 25 tahun, ditemukan dalam kondisi tubuh terpotong menjadi 65 bagian. Peristiwa ini mengguncang publik, tidak hanya karena kebrutalan tindakannya, tetapi juga karena keterkaitannya dengan relasi personal dalam hal ini hubungan yang diasosiasikan dengan “cinta” atau kedekatan emosional antara korban dan pelaku (Pos, 2025). Dalam wacana media, kasus ini tidak hanya diposisikan sebagai kejahatan kriminal, tetapi juga dipenuhi narasi mengenai hubungan pribadi, kekecewaan, hingga cemburu. Representasi semacam ini membuka ruang perdebatan: sejauh mana cinta dan relasi interpersonal dijadikan justifikasi atas kekerasan, dan bagaimana konstruksi gender berperan dalam melanggengkan narasi tersebut (Imran, 2015).

Kajian ini penting dilakukan karena representasi media terhadap kasus-kasus kekerasan seringkali mempengaruhi persepsi publik. Alih-alih menekankan hak-hak korban, media terkadang lebih menyoroti motif pribadi, bahkan menggeser simpati ke pelaku. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis representasi kekerasan berbasis gender dalam kasus Tiara Angelina, dengan fokus pada relasi cinta sebagai bingkai naratif yang diangkat publik dan media.

Fenomena kekerasan dalam pacaran (KDP) di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, dengan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mencatat ribuan kasus KDP setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa kekerasan intim bukanlah fenomena yang terisolasi. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada bentuk fisik atau psikologis, tetapi dapat meningkat hingga ke tingkatan yang paling ekstrem, yaitu pembunuhan. Kasus-kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, meskipun relatif jarang terjadi, merepresentasikan puncak eskalasi kekerasan yang paling keji dalam sebuah hubungan romantis (Perempuan, 2023).

Mutilasi melampaui tindakan pembunuhan biasa karena melibatkan perusakan identitas dan dehumanisasi korban secara fisik. Proses memotong-motong tubuh korban dapat diartikan sebagai manifestasi kekerasan simbolis yang paling brutal, di mana pelaku tidak hanya mengakhiri nyawa pasangannya, tetapi juga secara sistematis menghilangkan “kemanusiaan” atau integritas fisik korban (Imran, Mohammad Fadil., 2015.). Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan jejak kejahatan, yang menunjukkan adanya pertimbangan yang matang dan dingin di balik kejahatan tersebut. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus ekstrem seperti ini sangat diperlukan untuk melampaui narasi media yang sering kali hanya berfokus pada sensasionalisme dan bukannya akar masalah yang kompleks (IBITOYE, 2025).

Kejadian ini tidak hanya merupakan tindak pidana murni, tetapi juga mencerminkan fenomena serius mengenai Kekerasan Berbasis Gender (KBG), khususnya dalam konteks kekerasan dalam pacaran (KDP) atau kekerasan dalam relasi intim (*Intimate Partner Violence*). Relasi yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh kasih justru menjadi pemicu kekerasan ekstrem. Mutilasi sebagai bentuk kekerasan pasca-kematian menunjukkan tingkat dehumanisasi yang sangat tinggi terhadap korban, yang seringkali menjadi pola dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengurai bagaimana kasus mutilasi ini merepresentasikan siklus dan pola kekerasan berbasis gender dalam relasi intim, serta bagaimana masyarakat dan media memaknainya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Konsep ini merujuk pada kekerasan yang ditujukan pada seseorang karena ia dianggap berjenis kelamin tertentu (dalam hal ini, perempuan) dan disebabkan oleh ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender-Based Violence* (GBV) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan kekerasan atau bahaya yang ditujukan kepada individu karena perbedaan atau asumsi perbedaan peran gender yang ada di masyarakat. Kekerasan ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma sosial yang merugikan (misalnya, sistem patriarki). Meskipun KBG dapat dialami oleh siapa pun, mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak perempuan karena mereka secara historis dan struktural berada pada posisi yang lebih rentan akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dalam masyarakat.

KBG bukanlah sekadar tindakan kriminal biasa yang didasari emosi, tetapi merupakan manifestasi dari masalah struktural yang mendalam di masyarakat. Akar masalah utamanya meliputi sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan memiliki kekuasaan atas perempuan. Ini menciptakan norma bahwa laki-laki berhak mengontrol perempuan, yang menjadi dasar pembenaran kekerasan. Selain itu, adanya perbedaan peran dan hak yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, di mana peran dan identitas perempuan seringkali direndahkan atau dibatasi.

Adapun bentuk-bentuk KBG dapat dijelaskan sebagai berikut (Walby, 1990):

1. Kekerasan dalam rumah tangga / kekerasan intim: kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi oleh pasangan/anggota keluarga.
2. Kekerasan seksual: pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan hubungan seksual.
3. Kekerasan psikologis / emosional: intimidasi, ancaman, penghinaan, isolasi sosial, kontrol berlebihan (*coercive control*).
4. Kekerasan ekonomi: pengendalian akses terhadap uang, larangan bekerja, melarang pendidikan.
5. Kekerasan struktural/institusional: diskriminasi berbasis gender yang menghalangi akses ke layanan, pekerjaan, pendidikan, peradilan.
6. Kekerasan berbasis kehormatan / tradisi: praktik seperti pernikahan paksa, mutilasi genital perempuan (di beberapa konteks budaya), pembunuhan atas nama "kehormatan".

Penyebab KBG bersifat multi-level dan saling berinteraksi diantaranya (Jewkes, 2015):

1. Individu: norma, sikap, pengalaman kekerasan masa kecil, konsumsi alkohol/obat.
2. Relasi/interpersonal: dinamika kekuasaan antar pasangan, kontrol ekonomi.
3. Komunitas: norma sosial yang menormalisasi kekerasan atau menempatkan perempuan pada posisi subordinat.
4. Struktural/sistemik: hukum/lembaga yang lemah, akses layanan terbatas, ketidaksetaraan gender di ekonomi dan politik.

Dalam konteks kasus Tiara Angelina, konsep KBG relevan untuk menjelaskan bahwa tindakan kekerasan, pembunuhan, dan mutilasi yang dilakukan oleh pasangannya bukan semata-mata dipicu oleh emosi sesaat, melainkan merupakan manifestasi ekstrem dari struktur patriarki yang memberikan hak kepemilikan dan kontrol (kuasa) kepada laki-laki atas tubuh dan hidup perempuan dalam relasi intim (Fakih, 1999). KBG mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang sering kali bermuara pada kekerasan fisik ekstrem seperti pada kasus ini.

2.2. Kekerasan dalam Relasi Intim (*Intimate Partner Violence/IPV*) dan *Toxic Relationship*

Kasus mutilasi Tiara Angelina terjadi dalam konteks relasi cinta atau pacaran. Kekerasan dalam Pacaran (KDP) atau *Dating Violence* adalah bentuk spesifik dari IPV yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan intim, tanpa terikat pernikahan. KDP sering diawali oleh tanda-tanda yang dikenal sebagai *toxic relationship*, seperti kontrol berlebihan, cemburu patologis, merendahkan, hingga kekerasan psikis dan fisik yang berulang (Perempuan., 2025).

Beberapa penelitian (misalnya: Radius, 2025; detikJatim, 2025) menyebutkan bahwa hubungan pelaku dan korban dalam kasus ini adalah hubungan yang tidak sehat (*toxic*), ditandai dengan emosi tak terkendali dan rasa memiliki. Pelaku merasa memiliki kuasa penuh atas tubuh dan hidup korban, yang pada akhirnya meledak menjadi tragedi. KDP sering dianggap sebagai masalah privat, sehingga menyulitkan korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan (*Cycle of Violence*), dan masyarakat cenderung bersikap apatis (Radius, 2025).

Tindakan mutilasi terhadap jenazah korban menjadi penanda bahwa kasus ini telah mencapai derajat kekejaman dan kebiadaban tertinggi. Konsep Dehumanisasi menjadi penting di sini. Dehumanisasi adalah proses psikologis di mana pelaku menekan atau menghilangkan rasa kemanusiaan, moral, dan nilai agama yang ada pada dirinya terhadap korban, sehingga pelaku tega memperlakukan korban secara tidak manusiawi (detikJatim., 2025).

Dalam konteks KBG, mutilasi dapat dilihat sebagai upaya pemusnahan identitas dan kepemilikan mutlak atas tubuh perempuan. Memotong tubuh korban hingga menjadi ratusan bagian, seperti yang terjadi pada kasus Tiara (menjadi 554 bagian, menurut detikJatim, 2025), bukan hanya tindakan penghilangan barang bukti, tetapi juga simbolisasi pembalasan dendam (dendam yang dipendam) dan penegasan kekuasaan patriarki yang ekstrim. Tindakan ini juga dikaitkan dengan analisis Teori Anomi (Durkheim), di mana pelaku mengalami kehilangan kendali atau norma sosial (*hilang kendali*) sehingga melakukan tindakan di luar nalar (TV, Metro, 2025).

2.3. Mutilasi dan Dehumanisasi sebagai Puncak Kekerasan

Dehumanisasi merupakan penilaian atau perlakuan yang menghapus atau meniadakan atribut kemanusiaan seperti kapasitas merasakan, berpikir, martabat dari orang atau kelompok sehingga mereka dipandang layaknya binatang, objek, atau mesin. Teori integratif membedakan dua bentuk utama yaitu *animalistic* (menganggap lain seperti binatang) dan *mechanistic* (menganggap lain seperti benda/objek) (Haslam, Nick, 2006). Sedangkan mutilasi merupakan bentuk forensik/kekerasan, tindakan memotong, membedah, menghilangkan bagian tubuh, atau merusak integritas jasad secara sengaja; dapat terjadi saat hidup (*severe bodily harm*) atau setelah kematian (*post-mortem mutilation*) dan kadang berfungsi sebagai pesan, penghilangan bukti, ritual, atau pelampiasan (Aquila, 2022).

Beberapa mekanisme menjelaskan transisi dari sikap (dehumanisasi) ke tindakan ekstrem (mutilasi) (Haslam, Nick, 2006):

1. Penghilangan hambatan moral / moral disengagement

Teori Bandura menjelaskan bagaimana pelaku “memutuskan” kontrol moral melalui mekanisme seperti pembenaran moral, pelabelan eufemistik, dehumanisasi korban, perbandingan sosial, serta pemindahan tanggung jawab—semua ini memungkinkan

- tindakan yang sebelumnya tabu. Ketika korban sudah dikategorikan “bukan manusia penuh”, resistensi batin terhadap tindakan sadis ikut runtuh.
2. Desensitisasi dan framing ideologis
Propaganda, stereotip, atau framing perang/konflik membuat kelompok korban dilukiskan sebagai ancaman atau “musuh” sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap wajar atau perlu.
 3. Fungsi simbolik mutilasi
Mutilasi sering berfungsi sebagai simbol: menghina, mengekspos dominasi, menciptakan teror pada komunitas, atau “menghapus” identitas korban (mis. muka, jari, rambut sebagai identitas budaya). Proses ini memperkuat status korban sebagai “lain” secara literal lewat penghancuran tubuhnya. Studi antropologis dan sejarah menunjukkan penggunaan mutilasi sebagai alat intimidasi dan pewarisan trauma kolektif.
 4. Motivasi operasional (concealment, kontrol bukti, ritual, atau sadisme)
Dalam praktik forensik, dismemberment kadang dilakukan untuk menyembunyikan identitas atau mempermudah pembuangan; dalam konteks lain mutilasi bisa ritualistik atau seksual (mis. necrosadism), yang juga terkait hilangnya empati karena dehumanisasi.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif (*Qualitative Approach*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam (holistik dan komprehensif) mengenai fenomena sosial, yaitu representasi kekerasan berbasis gender (KBG) dalam kasus mutilasi Tiara Angelina, dari perspektif konteks dan narasi yang ada di masyarakat dan media. Desain penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus Tunggal Instrumental (*Instrumental Single Case Study*) (Creswell, 2018).

1. Studi Kasus: Memfokuskan diri pada satu kasus spesifik yang batas-batasnya jelas (kasus kekerasan yang menimpa Tiara Angelina) untuk diselidiki secara intensif.
2. Instrumental: Kasus ini bukan sekadar objek studi itu sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan wawasan (wawasan) yang lebih luas atau memperkuat pemahaman terhadap isu yang lebih umum, yaitu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan ekstremitas nya (mutilasi/dehumanisasi) dalam relasi intim. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Data Sekunder berupa dokumen, catatan, dan narasi yang telah dipublikasikan dan relevan dengan kasus.

Pengumpulan data akan didominasi oleh metode yang memungkinkan analisis mendalam terhadap narasi kasus yang telah berkembang di ruang public. Teknik pengumpulan dilakukan dengan menganalisis dokumen dan Media (*Content Analysis*). Metode utama yaitu mengumpulkan dan menganalisis secara sistematis berita, artikel, liputan investigasi, dan postingan media sosial resmi terkait kronologi, motif pelaku, dan respon publik terhadap kasus. Fokus analisis pada representasi yang digunakan media dalam menggambarkan korban, pelaku, dan kekerasan berbasis gender.

Analisis data mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang melibatkan tiga tahapan yang saling berhubungan (Miles, 2014):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Dalam konteks ini, data media dan wawancara akan difokuskan pada narasi yang secara eksplisit atau implisit mengandung elemen kuasa/kontrol, gender, dan dehumanisasi/mutilasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan tematik. Matriks akan digunakan untuk membandingkan narasi media dengan teori KBG.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Menarik kesimpulan berdasarkan temuan data yang didukung oleh teori-teori dalam tinjauan pustaka (KBG, IPV, Dehumanisasi). Kesimpulan akan diverifikasi secara berulang selama proses penelitian.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat mengupas kasus Tiara Angelina secara mendalam, tidak hanya sebagai peristiwa kriminal, tetapi sebagai representasi ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam relasi intim di masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus mutilasi Tiara Angelina menjadi cermin ekstrem dari realitas kekerasan berbasis gender di Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar tindak kriminal yang brutal, melainkan menunjukkan bagaimana relasi cinta yang timpang kuasa dapat bertransformasi menjadi kekerasan ekstrem, hingga berujung pada hilangnya nyawa dan penghancuran tubuh korban. Kekerasan semacam ini mengandung dimensi emosional, psikologis, dan simbolik yang kompleks di mana tubuh perempuan menjadi medan ekspresi kuasa patriarkal, kepemilikan, dan dehumanisasi dalam konteks hubungan intim.

4.1. Kekerasan Berbasis Gender (KBG): Akar Struktural Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan setiap tindakan kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, di mana konstruksi gender menjadi dasar terjadinya diskriminasi, subordinasi, dan dominasi terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Dalam kasus Tiara Angelina, kekerasan yang terjadi tidak dapat dipahami sebagai tindakan kriminal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai refleksi dari struktur sosial patriarkal yang mengobjektifikasi tubuh perempuan dan memosisikannya sebagai objek yang dapat dikendalikan oleh laki-laki. Bentuk-bentuk KBG dalam kasus ini tampak melalui kontrol dan posesivitas emosional yang merupakan kekerasan psikologis, ancaman dan intimidasi yang berlangsung selama hubungan, hingga kekerasan fisik yang berujung pada femisida (femicide) dan mutilasi. Tindakan mutilasi tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menjadi simbol penghancuran tubuh perempuan sebagai bentuk penegasan dominasi dan kekuasaan secara total.

Akar struktural KBG terletak pada distribusi kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam relasi intim yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, laki-laki sering diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar sehingga merasa berhak mengontrol perilaku, keputusan, bahkan kehidupan pasangannya. Kondisi ini tercermin dalam kasus Tiara Angelina, di mana konflik yang memicu pembunuhan berawal dari persoalan yang berkaitan dengan kontrol, seperti masalah pintu kos yang terkunci, dugaan persoalan emosional, maupun ketidakjelasan status hubungan. Dari perspektif pelaku, sikap korban yang dianggap tidak patuh atau menolak keinginannya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap otoritas, harga diri, dan posisi dominannya dalam hubungan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Kekerasan Berbasis Gender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih (1999), yang menyatakan bahwa subordinasi perempuan merupakan salah satu manifestasi utama ketidakadilan gender dalam masyarakat patriarkal. Dalam kerangka ini, tindakan kekerasan ekstrem seperti pembunuhan dan mutilasi dapat dipahami sebagai bentuk terakhir dari upaya pelaku untuk mempertahankan rasa kepemilikan mutlak (*sense of entitlement*) terhadap korban serta mengembalikan hierarki kuasa yang menurut persepsinya telah terganggu. Kekerasan fisik yang fatal menjadi mekanisme untuk membungkam, menghukum, dan memusnahkan perempuan yang dianggap tidak lagi tunduk pada kontrol pelaku. Dengan demikian, kasus Tiara Angelina menunjukkan bahwa relasi yang

dikonstruksikan sebagai hubungan cinta sesungguhnya telah diwarnai oleh ketimpangan kuasa, kecemburuan yang berlebihan, posesivitas, serta kontrol yang terus-menerus, yang kemudian berkembang menjadi *toxic relationship* dan berujung pada kekerasan sistematis hingga femisida.

4.2 *Toxic Relationship*: Mekanisme Psikologis dari Kekerasan Emosional

Toxic relationship merupakan dinamika hubungan yang ditandai oleh manipulasi, ketimpangan emosional, serta kekerasan psikologis yang dilakukan secara berulang sehingga secara perlahan mengikis batas diri, harga diri, dan otonomi korban. Dalam perspektif gender, hubungan yang bersifat toksik tidak hanya dipengaruhi oleh karakter individu, tetapi juga diperkuat oleh konstruksi sosial patriarkal yang menormalisasi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Konsep cinta dalam relasi semacam ini tidak lagi dimaknai sebagai hubungan yang setara, melainkan dikaitkan dengan kepatuhan, pengorbanan, dan kepemilikan terhadap pasangan. Akibatnya, perilaku mengontrol, posesif, hingga kekerasan emosional sering kali dianggap sebagai bentuk kasih sayang, padahal merupakan manifestasi awal dari kekerasan berbasis gender.

Dalam kasus Tiara Angelina, dinamika *toxic relationship* terlihat dari hubungan yang dipenuhi kontrol, kecemburuan berlebihan, serta ketidakseimbangan emosional antara korban dan pelaku. Perselisihan yang berulang dipicu oleh tuntutan kepemilikan, keinginan untuk mengendalikan perilaku korban, dan konflik mengenai status maupun keputusan pribadi korban. Ketika hubungan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan sesuai kehendak pelaku, muncul perasaan kehilangan kontrol yang kemudian dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas dan maskulinitasnya. Dalam kondisi tersebut, pelaku merespons dengan tindakan destruktif yang berpuncak pada pembunuhan disertai mutilasi sebagai bentuk pemulihan kuasa. Tubuh perempuan dalam kasus ini tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan martabat, melainkan menjadi simbol kontrol sosial patriarkal, representasi kekuasaan maskulin, dan objek kepemilikan absolut dalam relasi yang diklaim sebagai cinta.

Karakteristik utama *toxic relationship* juga tampak melalui upaya sistematis pelaku untuk mendominasi dan mengendalikan korban melalui kekerasan emosional dan psikologis. Pola hubungan antara Tiara Angelina dan pelaku menunjukkan adanya kontrol yang diwujudkan dalam kecemburuan berlebihan, tuntutan kepemilikan, serta pertengkaran yang terus berulang. Kekerasan emosional tersebut menciptakan iklim ketakutan, tekanan psikologis, dan ketergantungan yang membuat korban semakin sulit melepaskan diri dari hubungan. Dalam banyak kasus *toxic relationship*, mekanisme ini diperkuat melalui praktik *gaslighting*, yaitu manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan persepsi dan penilaiannya sendiri, serta melalui isolasi sosial yang membatasi hubungan korban dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Meskipun bukti rinci mengenai praktik *gaslighting* dalam kasus Tiara Angelina belum sepenuhnya terungkap, pola kekerasan emosional yang muncul menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan mekanisme tersebut, yaitu membangun ketergantungan korban terhadap pelaku dan mempersempit ruang bagi korban untuk mencari dukungan.

Paparan kekerasan emosional yang berlangsung secara terus-menerus memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap korban. Harga diri dan identitas korban mengalami erosi sehingga korban mulai menyalahkan dirinya sendiri (*self-blame*) atas perilaku pelaku serta menginternalisasi anggapan bahwa dirinya pantas menerima perlakuan tersebut. Kondisi psikologis ini menjadi salah satu faktor yang membuat korban tetap bertahan dalam hubungan meskipun mengalami kekerasan, sekaligus membuka ruang bagi terjadinya eskalasi kekerasan ke tingkat yang lebih serius.

Di sisi lain, *toxic relationship* juga menjadi ruang bagi pelaku untuk memproyeksikan kegagalan regulasi emosinya kepada pasangan. Ketidakmampuan mengelola kemarahan, frustrasi, dan konflik menyebabkan pelaku memindahkan tanggung jawab atas emosinya kepada korban dengan menuduh korban sebagai penyebab kemarahannya (Cak Dil & Radius,

2025). Melalui mekanisme ini, pelaku membangun rasionalisasi bahwa tindakan kekerasan merupakan konsekuensi yang layak diterima oleh korban karena dianggap telah melanggar kehendak atau kontrol yang diinginkannya. Rasionalisasi tersebut berfungsi sebagai pembenaran psikologis yang memudahkan pelaku meningkatkan intensitas kekerasan, mulai dari kekerasan emosional, kekerasan fisik, hingga pembunuhan. Dalam kasus Tiara Angelina, tindakan mutilasi setelah pembunuhan juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pelaku menghilangkan bukti sekaligus mempertahankan kontrol simbolik terhadap tubuh korban.

Dengan demikian, dinamika *toxic relationship* dalam kasus Tiara Angelina merupakan tahapan penting yang menormalisasi kekerasan dalam bingkai cinta, kepemilikan, dan dominasi. Kekerasan emosional yang terjadi sebelum pembunuhan berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang melemahkan korban sekaligus memperkuat legitimasi kontrol pelaku. Ketika kontrol tersebut gagal dipertahankan, eskalasi menuju kekerasan fisik ekstrem menjadi lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa *toxic relationship* bukan sekadar hubungan yang tidak sehat, melainkan bagian dari spektrum kekerasan berbasis gender yang berpotensi berkembang menjadi femisida dan dehumanisasi ekstrem terhadap perempuan.

4.3 Mutilasi dan Dehumanisasi sebagai Puncak Kekerasan

Konsep dehumanisasi yang dikemukakan oleh Haslam (2006) menjelaskan proses ketika seseorang tidak lagi dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan otonomi, melainkan direduksi menjadi objek yang dapat dikuasai, dimanfaatkan, atau dimusnahkan. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, dehumanisasi merupakan tahapan lanjutan dari relasi yang telah dipenuhi dominasi, kontrol, dan kekerasan emosional. Pada kasus Tiara Angelina, tindakan pelaku tidak berhenti pada pembunuhan, tetapi berlanjut pada mutilasi terhadap tubuh korban. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa korban tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki nilai kemanusiaan, melainkan sebagai objek yang dapat dihancurkan sepenuhnya. Dengan demikian, tubuh korban direduksi menjadi benda, mutilasi menjadi simbol penghapusan identitas dan eksistensi korban, serta kekerasan mencapai bentuk paling ekstrem karena pelaku tidak hanya mengakhiri kehidupan korban, tetapi juga berupaya menghilangkan kemanusiaannya secara simbolik maupun fisik.

Dehumanisasi dalam kasus ini menjadi jembatan yang menghubungkan kekerasan emosional dengan kekerasan ekstrem. Hilangnya empati dan batas moral membuat tubuh perempuan berubah menjadi media untuk mengekspresikan kebencian, dominasi, dan penguasaan. Kasus Tiara Angelina menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai bentuk kekerasan yang sebelumnya telah dinormalisasi dalam hubungan. Kontrol berlebihan, manipulasi emosional, posesivitas, serta kekerasan verbal yang sering dianggap sebagai persoalan pribadi atau bagian dari dinamika hubungan justru menjadi fondasi yang memungkinkan terjadinya eskalasi menuju kekerasan fatal. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoler (2013), budaya permisif terhadap kekerasan dalam relasi intim menyebabkan masyarakat sering kali mengabaikan tanda-tanda awal hubungan yang tidak sehat, sehingga intervensi terhadap kekerasan menjadi terlambat.

Dalam budaya patriarki, tubuh perempuan rentan mengalami objektifikasi, yaitu dipandang sebagai properti, simbol kepemilikan, atau sarana pemenuhan kepentingan laki-laki. Ketika perempuan dianggap tidak lagi memenuhi ekspektasi pelaku atau berani menolak kontrol yang diberikan, tubuhnya diperlakukan sebagai objek yang dapat dihancurkan. Pada kasus Tiara Angelina, pelaku secara sadar maupun tidak sadar menolak mengakui korban sebagai manusia yang memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Tindakan memotong jenazah korban menjadi ratusan bagian—yang dalam berbagai laporan disebut mencapai sekitar 554 potongan—melampaui kebutuhan praktis untuk menghilangkan barang bukti. Tindakan tersebut merepresentasikan upaya simbolik untuk menghapus identitas, integritas fisik, dan keberadaan korban secara total. Tingkat kebrutalan tersebut menunjukkan intensitas

kebencian sekaligus kebutuhan pelaku untuk memastikan bahwa korban tidak lagi memiliki bentuk maupun makna sebagai manusia, sehingga dominasi pelaku tetap dipertahankan bahkan setelah korban meninggal dunia.

Dalam perspektif Kekerasan Berbasis Gender, mutilasi memiliki makna simbolik yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar tindak kriminal biasa. Jika pembunuhan mengakhiri kehidupan korban, maka mutilasi merupakan bentuk klaim kekuasaan terhadap tubuh korban bahkan setelah kematian. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai pesan simbolik yang ditujukan kepada perempuan yang dianggap menolak atau melawan kontrol laki-laki. Dengan kata lain, mutilasi menjadi manifestasi ekstrem dari kekuasaan patriarki yang menegaskan bahwa kontrol pelaku tidak berhenti pada kehidupan korban, tetapi juga meluas hingga terhadap jasadnya. Tubuh perempuan dijadikan media untuk memperlihatkan supremasi, kepemilikan, dan dominasi absolut yang diyakini pelaku masih dapat dipertahankan setelah korban kehilangan nyawanya.

Selain dimensi simbolik tersebut, mutilasi juga mencerminkan akumulasi kemarahan dan kegagalan regulasi emosi pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Radius (2025), tindakan mutilasi dapat dipahami sebagai pelepasan dendam yang telah lama terakumulasi akibat frustrasi, kecemburuan, dan kegagalan pelaku mempertahankan kontrol dalam hubungan yang bersifat toksik. Dalam kondisi demikian, tubuh korban menjadi sasaran pelampiasan emosi yang tidak mampu dikelola secara adaptif. Namun demikian, di balik dominasi aspek emosional tersebut juga terdapat pertimbangan instrumental. Pemotongan tubuh menjadi bagian-bagian kecil bertujuan untuk menghilangkan barang bukti, mempersulit proses identifikasi korban, serta menghambat penyelidikan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara ledakan emosi yang ekstrem dan pengambilan keputusan yang bersifat rasional, suatu karakteristik yang kerap ditemukan dalam tindak kejahatan dengan tingkat kekerasan tinggi.

Meskipun peristiwa ini berawal dari ranah privat, tingkat kekerasan yang sangat ekstrem menjadikan kasus Tiara Angelina sebagai persoalan publik yang memunculkan guncangan sosial dan perhatian luas dari masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran maupun hubungan intim dapat berkembang menjadi kejahatan yang sangat brutal apabila tanda-tanda awal tidak dikenali dan tidak ditangani secara memadai. Selain itu, kasus ini juga memunculkan diskursus mengenai perlunya penguatan sistem perlindungan perempuan, peningkatan deteksi dini terhadap kekerasan dalam pacaran, serta evaluasi terhadap mekanisme pengawasan pada lingkungan tempat tinggal bersama, termasuk rumah kos. Dengan demikian, mutilasi dalam kasus Tiara Angelina tidak hanya merepresentasikan puncak eskalasi Kekerasan Berbasis Gender, tetapi juga menjadi indikator kegagalan struktur sosial dalam mencegah akumulasi kekerasan yang berujung pada dehumanisasi total terhadap perempuan. Mutilasi dalam kasus ini merupakan perwujudan fisik dari hilangnya pengakuan atas kemanusiaan korban, yang berakar pada relasi kuasa yang timpang, rasa kepemilikan dalam hubungan yang toksik, serta budaya patriarki yang masih memberikan ruang bagi normalisasi kekerasan terhadap perempuan.

4.4 Implikasi Sosial, Hukum dan Struktural

Kasus mutilasi Tiara Angelina sebagai puncak kekerasan ekstrem dalam relasi intim memiliki implikasi yang jauh melampaui dimensi kriminalitas semata. Peristiwa ini menjadi refleksi atas kerentanan struktural dalam sistem perlindungan perempuan di Indonesia sekaligus memperlihatkan bagaimana kekerasan berbasis gender masih dipengaruhi oleh norma sosial, budaya patriarki, serta kelemahan mekanisme pencegahan dan penanganannya. Selain memunculkan keprihatinan publik yang luas, kasus ini juga memicu beragam respons sosial, mulai dari solidaritas terhadap korban hingga munculnya narasi yang menyalahkan korban (*victim blaming*). Menurut Pettigrew (2022), pemberitaan mengenai kasus kekerasan berbasis gender yang ekstrem sering kali menghasilkan dua kutub respons sosial, yaitu

kepanikan moral (*moral panic*) dan kecenderungan mengalihkan tanggung jawab kepada korban, sehingga perhatian publik bergeser dari akar struktural kekerasan menuju perilaku atau pilihan pribadi korban.

Brutalitas tindakan mutilasi dalam kasus Tiara Angelina menimbulkan kepanikan moral di masyarakat, khususnya terkait keamanan dalam hubungan pacaran dan lingkungan tempat tinggal non-komunal seperti rumah kos. Kasus ini menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam relasi intim tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan privat, melainkan merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama. Namun demikian, di tengah meningkatnya kepedulian publik, masih ditemukan kecenderungan *victim blaming* yang tampak dalam berbagai narasi media maupun diskusi masyarakat. Pertanyaan mengenai status hubungan korban dengan pelaku, pilihan tinggal bersama, gaya hidup, atau karakter korban sering kali lebih mendapat perhatian dibandingkan analisis terhadap relasi kuasa yang melatarbelakangi kekerasan tersebut. Dalam perspektif struktural, *victim blaming* merupakan mekanisme sosial yang mempertahankan norma patriarki dengan memindahkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban, sehingga akar masalah berupa ketimpangan gender menjadi tidak terlihat (Leyens, 2000–2003).

Kasus ini juga memperlihatkan berbagai kelemahan dalam sistem perlindungan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Pacaran (KDP). Hingga saat ini, KDP masih sering dipandang sebagai persoalan pribadi sehingga berbagai bentuk kekerasan emosional, psikologis, maupun kontrol berlebihan belum memperoleh perhatian yang memadai sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik yang fatal. Kasus Tiara Angelina menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap KDP sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender yang memerlukan deteksi dini, pendampingan psikologis, serta intervensi hukum sejak munculnya indikator awal kekerasan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan dan P2TP2A perlu memperkuat program edukasi, layanan konseling, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses agar korban dapat memperoleh perlindungan sebelum kekerasan mencapai tahap yang mengancam keselamatan jiwa.

Lokasi terjadinya kasus di sebuah rumah kos juga memunculkan diskursus mengenai keamanan lingkungan tempat tinggal non-komunal. Respons pemerintah daerah maupun aparat kepolisian yang menyoroti praktik tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sering kali lebih menekankan aspek moralitas dibandingkan aspek perlindungan terhadap penghuni (Jatim, 2025). Pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan persoalan utama, yaitu kebutuhan akan sistem keamanan dan perlindungan yang responsif terhadap kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, kebijakan yang dikembangkan seharusnya berorientasi pada peningkatan keamanan penghuni, penyediaan mekanisme pelaporan yang efektif, serta penguatan perspektif gender dalam pengelolaan lingkungan tempat tinggal, bukan sekadar melakukan kriminalisasi terhadap pilihan hidup atau status hubungan individu.

Dari perspektif penegakan hukum, tindakan mutilasi dalam kasus ini juga menuntut adanya penerapan perspektif gender (*gender lens*) dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Kekejaman yang ditunjukkan pelaku tidak hanya mencerminkan tindak pidana pembunuhan, tetapi juga menunjukkan adanya relasi kuasa, dominasi, dan dehumanisasi yang berakar pada kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan dimensi tersebut agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga mampu mengakomodasi pengalaman korban serta konteks struktural yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan substantif bagi korban perempuan dapat diwujudkan melalui sistem hukum yang sensitif terhadap isu gender.

Lebih luas lagi, kasus Tiara Angelina dapat dipandang sebagai *instrumental case* yang memberikan dorongan bagi perubahan kebijakan dan penguatan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Kasus ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi emosional, khususnya

di kalangan remaja dan dewasa muda, agar mereka mampu mengenali tanda-tanda *toxic relationship*, memahami batas diri (*boundaries*), menghormati persetujuan (*consent*), serta mengembangkan kemampuan regulasi emosi dan manajemen konflik dalam hubungan interpersonal (Bandura, 1999; Radius, 2025). Pendidikan mengenai relasi yang sehat tidak lagi dapat diposisikan sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi bagian dari strategi preventif untuk mencegah berkembangnya kekerasan dalam hubungan intim.

Implikasi struktural lainnya adalah perlunya penguatan implementasi regulasi yang berorientasi pada perlindungan korban, termasuk semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi dalam hubungan intim di luar perkawinan. Dengan demikian, kasus mutilasi Tiara Angelina memperlihatkan adanya paradoks antara meningkatnya keprihatinan publik terhadap kekerasan ekstrem dan masih lemahnya respons struktural dalam mengatasi akar penyebabnya. Kasus ini menjadi momentum penting untuk menggeser fokus penanganan dari narasi *victim blaming* menuju penguatan tanggung jawab kolektif dan reformasi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan korban, serta penghapusan kekerasan berbasis gender secara menyeluruh (Guggenheimer, 2021).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus mutilasi yang menimpa Tiara Angelina merupakan representasi ekstrem dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam konteks relasi intim. Peristiwa ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindak pidana pembunuhan, melainkan sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa yang berakar pada budaya patriarki, dinamika *toxic relationship*, serta proses dehumanisasi terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi merupakan puncak dari eskalasi kekerasan emosional, psikologis, dan fisik yang berkembang secara bertahap hingga berujung pada femisida dan mutilasi. Oleh karena itu, kasus Tiara Angelina menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan persoalan struktural yang melibatkan faktor sosial, budaya, psikologis, dan kelembagaan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidimensional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akar utama kekerasan dalam kasus ini adalah ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang merasa memiliki hak untuk mengendalikan tubuh, pilihan, dan kehidupan perempuan. Dalam kerangka budaya patriarki, relasi cinta mengalami distorsi menjadi relasi kepemilikan (*sense of entitlement*), sehingga penolakan atau kegagalan pelaku mempertahankan kontrol dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas dan otoritas maskulinnya. Kondisi tersebut melahirkan berbagai bentuk kekerasan emosional, posesivitas, manipulasi psikologis, dan kontrol berlebihan yang menjadi karakteristik *toxic relationship*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *toxic relationship* merupakan ruang sosial yang memungkinkan terjadinya eskalasi Kekerasan Berbasis Gender apabila tidak dikenali dan ditangani sejak tahap awal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan mutilasi terhadap tubuh korban merupakan bentuk dehumanisasi total yang melampaui motif pragmatis untuk menghilangkan barang bukti. Mutilasi merupakan tindakan simbolik yang bertujuan menghapus identitas, martabat, dan integritas fisik korban sebagai manusia. Tubuh perempuan direduksi menjadi objek yang dapat dikuasai, dihancurkan, dan dimanipulasi sebagai bentuk penegasan dominasi pelaku bahkan setelah korban meninggal dunia. Dalam perspektif Kekerasan Berbasis Gender, tindakan tersebut mencerminkan bentuk paling ekstrem dari objektifikasi perempuan sekaligus memperlihatkan hilangnya empati, batas moral, dan pengakuan terhadap hak asasi korban. Dengan demikian, mutilasi dalam kasus Tiara Angelina dapat dipahami sebagai manifestasi tertinggi dari dehumanisasi yang berakar pada relasi kuasa yang timpang dan kegagalan pelaku dalam meregulasi emosi serta menerima otonomi korban.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Tiara Angelina memiliki konsekuensi sosial dan struktural yang luas. Dari sisi sosial, kasus ini memunculkan kepanikan moral sekaligus memperlihatkan masih kuatnya praktik *victim blaming* yang mengalihkan perhatian dari akar struktural kekerasan menuju perilaku korban. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kasus ini mengungkap masih lemahnya sistem deteksi dini, perlindungan, dan penanganan Kekerasan dalam Pacaran (KDP), sehingga berbagai bentuk kekerasan emosional dan psikologis sering kali tidak memperoleh intervensi sebelum berkembang menjadi kekerasan fatal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perspektif gender dalam sistem penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan, serta pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada pencegahan daripada sekadar penindakan setelah kejahatan terjadi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi emosional, pendidikan mengenai relasi yang sehat, penghormatan terhadap batas diri (*boundaries*), persetujuan (*consent*), serta kemampuan regulasi emosi sebagai strategi preventif untuk mencegah berkembangnya *toxic relationship* menjadi kekerasan berbasis gender. Selain itu, implementasi kebijakan perlindungan perempuan, termasuk penguatan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan layanan perlindungan korban, perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan dalam relasi intim. Dengan demikian, kasus mutilasi Tiara Angelina harus dipandang sebagai peringatan bahwa Kekerasan Berbasis Gender bukan sekadar persoalan individual, melainkan krisis sosial yang memerlukan respons kolektif, sistematis, dan berperspektif gender guna mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aquila, I. (2022). The Role of Forensic Investigation in an Unusual Case of Patricide by a Schizophrenic Woman Involving Dismemberment of a Decomposed Body. *Diagnostics*, 12(7), 1577; <https://doi.org/10.3390/diagnostics12071577>.
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *SAGE Journal*.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- detikJatim. (2025). 6 Fakta Penjelasan Ilmiah Alvi Tega Mutilasi Tiara Jadi 554 Potong.
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guggenheimer, D. e. (2021). *Criminal mutilation in Sweden from 1991 to 2017*. Willey Online Library.
- Harjoni. (2013). *Power dalam Kekerasan Seksual: Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung*. Saree: Research in Gender Studies, IAIN Lhokseumawe.
- Haslam, Nick. (2006). Dehumanization: an integrative review. *Pers Soc Psychol Rev*, 10(3):252-64. doi: 10.1207/s15327957pspr1003_4.
- IBITOYE, A. &-E. (2025). "Media Representation of Gender-Based Violence Against Women in Nigeria: A Feminist Critical Discourse Analysis.". *Int. Journal of Humanities, Literature and Art Research*.
- Imran, M. F. (2015). *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, .
- Imran, Mohammad Fadil. (2015.). *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jatim, D. (2025). *Kasus Mutilasi Tiara Angelina*.
- Jewkes, R. F. (2015). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: A conceptual shift in prevention of violence against women and girls. . *The Lancet*, 385(9977), 1580–1589.
- Leyens, J.-P. e. (2000-2003). *Infrahumanization and attribution of secondary emotions. (teori infrahumanisasi)*. PubMed Journal.

- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Perempuan, K. (2023). *Catahu: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Perempuan., K. (2025). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. . Jakarta: Komnas Perempuan.
- Perempuan., Komnas. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU): Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Pettigrew, M. (. (2022). *Exploring the sexual component of post-mortem mutilation / necrosadism*. Taylor & Francis Journal.
- Pos, R. B. (2025). "Tiara Angelina Saraswati, Korban Mutilasi Mojokerto, Ini Kronologi dan Penangkapan Pelaku." .
- Stoler, A. L. (2013). *Imperial Debris: On Ruins and Ruination*. Amazon Journal.
- TV, Metro. (2025). *Polres Mojokerto Gelar Rekonstruksi Mutilasi Tiara Angelina*.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. . *Sociology*, 23(2), 213–234.